



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 66 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib arsip dan mempermudah penemuan kembali arsip secara cepat dan tepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Klasifikasi Arsip;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Klasifikasi arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



TAVIP WURJONO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

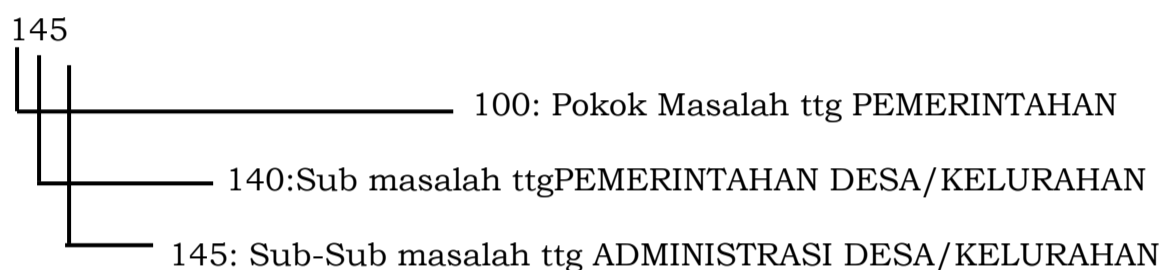
NIP. 19641123 199303 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

1. Klasifikasi arsip disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Klasifikasi diperinci secara decimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut :



4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitatif dan sub stantif Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah :

a. Perincian dasar / Pokok Masalah :

000	U M U M
100	PEMERINTAHAN
200	POLITIK
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
500	PEREKONOMIAN
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
700	PENGAWASAN
800	KEPEGAWAIAN
900	KEUANGAN

b. Sub Masalah

000	UMUM
010	URUSAN DALAM
020	BARANG DAN JASA
030	KEKAYAAN DAERAH
040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
050	PERENCANAAN DAN EVALUASI
060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
080	KONFRENSI/RAPAT KOORDINASI
090	PERJALANAN DINAS

100 PEMERINTAHAN

- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
- 160 DPRD PROVINSI
- 170 DPRD KABUPATEN/KOTA
- 180 H U K U M
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

200 P O L I T I K

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU/ PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA
- 290 -

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN/TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN PIHAK LAIN

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 410 PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
- 420 PENDIDIKAN
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 450 A G A M A
- 460 S O S I A L
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 480 MEDIA MASSA

500 PERKONOMIAN

- 510 PERDAGANGAN
- 520 PERTANIAN
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 550 PERHUBUNGAN
- 560 TENAGA KERJA
- 570 PENANAMAN MODAL
- 580 PERBANKAN/MONETER
- 590 AGRARIA

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

- 610 PENGAIRAN
- 620 JALAN
- 630 JEMBATAN
- 640 BANGUNAN
- 650 TATA RUANG KOTA
- 660 TATA LINGKUNGAN

670 KETENAGAAN
680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM
690 AIR MINUM

700 PENGAWASAN

710 BIDANG PEMERINTAHAN
720 BIDANG POLITIK
730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
750 BIDANG PEREKONOMIAN
760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
770 BIDANG PEJABAT PUBLIK
780 BIDANG KEPEGAWAIAN
790 BIDANG KEUANGAN

800 KEPEGAWAIAN

810 PENGADAAN
820 MUTASI
830 KEDUDUKAN
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
850 C U T I
860 PENILAIAN
870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
880 PEMBERHENTIAN
890 PENDIDIKAN PEGAWAI

900 KEUANGAN

910 ANGGARAN
920 AKUNTANSI
930 PERBENDAHARAAN
940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
950 PENGELOLAAN KAS DAERAH
960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
970 PENDAPATAN

PERINCIAN KLASIFIKASI ARSIP

Kode	Masalah
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
001.4	Bandir/Umbul-umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya/ Besar
003.1	Nasional (17 Agustus , Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun / HUT (Hari Jadi Provinsi/ Kab/ Kota)
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat lainnya
010	URUSAN DALAM
011	Gedung kantor , termasuk instalasi
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alaam
011.7	Internet
011.8	Tanam dan tanaman
012	Rumah Dinas
013	Akomodasi / Persinggahan (mess/ wisma/ hotel)
014	Rumah Susun / apartemen

- 015 Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop dll)
- 016 Pengurusan kendaraan dinas
- 017 Keamanan/ ketertiban kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - 019.1 Upacara Bendera
 - 019.2 Tata tempat
 - 019.2.1 Pemasangan gambar Presiden/ Wakil Presiden
 - 019.3 Audiensi
 - 019.4 Penerimaan Tamu
 - 019.5 Kerjasama
- 020 BARANG DAN JASA
 - 021 Penawaran
 - 021.1 Penawaran barang
 - 021.2 Penawaran jasa
 - 023 Jasa

- 027 Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang
 - 027.1 Prekualifikasi : rapat presiden, HPS, penjelasan pekerjaan/ anwijizing, negosiasi, evaluasi
 - 027.2 Sprak / , kontrakan, / Amandemen/ Addendum, Teguran
 - 027.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - 027.4 Serah terima pekerjaan
 - 027.5 Pemeriksaan pekerjaan
 - 027.6 Perpanjangan waktu/ force majore
 - 027.7 Denda
 - 027.8 Sanggahan
 - 027.9 Pemeliharaan Barang/ Jasa
- 028 Inventaris
 - 028.1 Pendataan Barang Milik Negara
 - 028.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
 - 028.3 Penghapusan Barang Milik Negara
- 030 KEKAYAAN DAERAH

- 031 Barang - Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
- 032 Barang - Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen/ bangunan bersejarah dll)
- 033 Tanaman
- 034 Alat-Alat Berat
- 035 Hewan
- 036 Barang Persediaan Dalam Gudang
- 037 Alat Pengangkut(Darat, Laut, Udara)
- 038 Peralatan Pabrik, Laboratorium
- 039 Peralatan Kesehatan / Medis (Rumah Sakit, Bali Pengobatan
- 040 PERPUSTAAAN/ DOKUMEN/ KEARSIPAN/ SANDI
- 041 Perpustakaan
- 041.1 Pameran Bahan Perpustakaan
- 041.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
- 041.3 Sirkulasi/ layanan
- 041.31 Keanggotaan
- 041.32 Peminjaman dan pengembalian
- 041.4 Deposit
- 041.5 Pemeliharaan, Pelestarian/ alih media
- 041.6 Pembinaan Perpustakaan
- 041.61 Bantuan buku, rak
- 041.7 Pnghapusan/ penyusunan bahan perpustakaan
- 041.8 Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
- 041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan Kerjasama antar Perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 045 Kearsipan
- 045.1 Pola Klasifikasi
- 045.2 Akuisisi Arsip
- 045.3 Penyusutan Arsip
- 045.31 Jadwal Retensi Arsip
- 045.32 Penilaian Arsip
- 045.33 Pemindahan Arsip
- 045.34 Penyerahan Arsip

045.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan
045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian/ Konservasi Arsip
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran Bahan Perpustakaan
045.72	Penerbitan Naskah Sumber
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Tlex, Radio, ISB
048	Data Elektronik
050	PERENCANAAN DAN EFALUASI
	meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) RPJPJD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang ,Musrenbangpus antar kementrianm, musrenbangnas, Musrenbangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RPK (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)

050.24	Rencana Kerja SKPD
050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KPUA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
050.26	Jabatan Gubernur atas Pandangan Fraksi
050.27	Nota Keuangan
050.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan Berkala
051.2	LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis
052.11	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
052.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
052.13	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kota
052.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
061	Organisai
061.1	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
061.2	Tata Tertib Kantor , Termasuk Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi Semi Pemerintah
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel Dinas Dan Stempel Jabatan
065.3	Papan Nama Instansi Pemerintah/ non Pemerintah
065.4	Alamat-alamat Kantor Dan Pejabat
065.5	Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
066	Tata Hubungan Kerja
067	Standart Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan

- 069 Analisis Jabatan
- 069.1 Pengukuran/Penilaian Beban Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
- 069.2 Uraian Jabatan
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 071 Riset Meliputi perjanjian bagi peneliti, riset design , pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Pengembangan
- 072.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
- 072.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
- 072.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster, kab/kota,desainovatif
- 072.4 Inkubator Tehnologi dan Bisnis
- 072.5 Pameran Produk Inovasi/Riset
- 072.6 BTC (Bisnis Teknologi center)
- 072.7 Rapterk (Penerapan Iptek)
- 072.8 HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)

- 073 Kajian
- 073.1 Kajian Strategis /diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
- 073.2 Seminar
- 073.3 Workshop
- 073.4 Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
- 073.5 Lokakarya
- 073.6 Diseminasi / Sosialisasi Hasil Penelitian
- 074 Kerjasama Penelitian
- 074.1 Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
- 074.2 Perguruan Tinggi Negri / Swasta
- 074.3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
- 074.4 Lembaga Internasional
- 075 Perekayasaan
- 076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
- 077 Publikasi Ilmiah
- 077.1 Jurnal Ilmiah

- 080 **KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI**
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
- 084 Instansi Lainnya (diuar kemendagri)
- 085 International di dalam negeri
- 086 International di luar negeri

- 090 **PERJALANAN DINAS**
- 091 Perjalana Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
- 094 Perjalanan PNS, meliputi surat perintah tugas (SPT) dan Surat Tugas
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalana Presiden / Wakil Presiden ke luar negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke luar negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke luar negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke luar negeri
- 100 **PEMERINTAHAN**
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan , sumpah dan serah trima jabatan
- 111.1 Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
- 111.2 Amanat Presiden / Amanat kenegaraan

- 112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima
- 113 susunan kabinet
- 113.1 Reshuffle
- 113.2 Penunjang Menteri ad intern
- 113.3 Sidang kabinet, sidang stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1
- 114 Kementrian Dalam Negeri
- 114.1 Amanat menteri dalam negeri

- 115 Kementrian lainya
- 116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
- 117 Lembaga Non Kementrian
- 118 Otonomi Daerah
- 119 Kerjasama antar kementrian
- 120 **PEMERINTAH PROVINSI**
- 120.01 Kebijakan Pemerintah Povinsi
- 120.02 Laporan Kinerja Pertanggung jawaban Gubernur (LKPJ)
- 120.03 Monografi, tambahan kode Wilayah
- 120.1 Koordinasi
- 120.11 Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 120.12 Instansi Vertikal
- 120.13 Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan luar negri
- 121 Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah trima jabatan dan sebagainya
- 122 Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah trima jabatan dan sebagainya
- 123 Sekretaris Daerah, meliputi pencalon, serah trima jabatan
- 124 Badan-badan Pertimbangana Daerah , meliputi Muspida
- 125 Pembentukan / Pemekaran
- 125.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 125.2 Pembentukan Wilayah
- 125.3 Perubahan Batas Wilayah
- 125.4 Pemekaran Wilayah
- 125.5 Permasalahan Batas Wilayah
- 125.6 Pemindahan Ibukota Provinsi
- 125.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan

- 130 **PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**
- 130.01 Kebijakan Pemerintah Kabupaten / kota
- 130.02 Laporan Kinerja Pertanggung jawaban Bupati/ Walikota (LKPJ)
- 130.03 Monografi, tambahan kode Wilayah

- 130.1 Koordinasi
- 130.11 Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 130.12 Instansi Vertikal
- 130.13 Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan luar negeri (Sister City)
- 131 Bupati / Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah trima jabatan dan sebagainya
- 132 Wakil Bupati/ walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah trima jabatan dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah, meliputi pencalon, serah trima jabatan
- 134 Forum koordinasi Pemerintah di Daerah, Meliputi Muspida

- 135 Pembentukan Daerah
- 135.1 Pembentukan Daerah Otonom
- 135.2 Pembentukan Wilayah
- 135.3 Perubahan Batas Wilayah
- 135.4 Pemekaran Wilayah
- 135.5 Permasalahan Batas Wilayah
- 135.6 Pemindahan Ibukota Kabupaten/ Kota
- 135.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan

- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
- 138.1 Pembentukan Kecamatan
- 138.2 Pemekaran Kecamatan
- 138.3 Perluasan / Perubahan batas Wilayah Kecamatan
- 138.4 Pemindahan Ibu kota kecamatan
- 138.5 Laporan Kecamatan

- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 Pamong desa
meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan,
pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
- 142 Anggaran Pendapatan dan belanja Desa / Kelurahan (APBDes/Kel)
- 143 Kekayaan Desa : bondo desa tanah bangkok dll

- 144 Lembaga Tingkat Desa : Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD
- 145 Administrasi Desa / Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll

- 146 Kewilayahan
 - 146.1 Pembentukan Desa / Kelurahan
 - 146.2 Pemekaran Desa / Kelurahan
 - 146.3 Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Desa / Kelurahan
 - 146.4 Perubahan nama Desa / Kelurahan
 - 146.5 Permasalahan Batas Desa / Kelurahan

 - 146.6 Penyatuan Desa / Kelurahan
 - 146.7 Penghapusan Desa / Kelurahan
- 147 RT-RW

- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
- 151 Keanggotaan MPR
 - 151.1 Pencalonan
 - 151.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
 - 151.3 Pemberhentian
 - 151.31 Recall
 - 151.32 Meninggal
 - 151.4 Pelanggaran
 - 151.5 Pergantian antar Waktu
- 152 Keanggotaan DPR
 - 152.1 Pencalonan
 - 152.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
 - 152.3 Pemberhentian
 - 152.31 Recall
 - 152.32 Meninggal
 - 152.4 Pelanggaran
 - 152.5 Pergantian antar Waktu

153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
154	Persidangan
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan/ Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan kerja/ Study Banding/ Konsultasi
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislatif Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-Rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD

- 162.13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislatif , Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
- 162.14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- 162.15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
- 162.16 Rapat Fraksi
- 162.2 Fraksi
- 162.3 Tata Tertib
- 162.4 Kode Etik
- 162.5 Reses
- 162.6 Peninjauan/ Kunjungan Lapangan
- 162.7 Kunjungan kerja/ Study Banding/ Konsultasi

- 163 Kesejahteraan
- 163.1 Keuangan
- 163.2 Penghargaan
- 164 Hak
- 170 **DPRD KABUPATEN / KOTA**
- 171 Keanggotaan
- 171.1 Pencalonan
- 171.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 171.3 Pelanggaran

- 171.4 Pemberhentian Antar Waktu
- 171.41 Meninggal Dunia
- 171.42 Mengundurkan Diri
- 171.43 Diberhentikan
- 171.5 Alat Kelengkapan Dewan
- 171.51 Pimpinan
- 171.52 Badan Musyawarah
- 171.53 Komisi
- 171.54 Badan Legislatif Daerah
- 171.55 Badan Anggaran
- 171.56 Badan Kehormatan
- 171.57 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)

172	Persidangan
172.1	Rapat-Rapat
172.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.12	Rapat Pimpinan DPRD
172.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislatif , Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.16	Rapat Fraksi
172.2	Fraksi
172.3	Tata Tertib
172.4	Kode Etik
172.5	Reses
172.6	Peninjauan/ Kunjungan Lapangan
172.7	Kunjungan kerja/ Study Banding/ Konsultasi
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
180	HUKUM
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang-Undang Dasar
180.13	Undang-Undang
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres/Perpres/Inpres
180.16	Kepmen/Permen/Inmen
180.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Perda, Keppub, Pergub, Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten / Kota meliputi Perda, Kepbup/Kepwal, PerBup/PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah

181.2	Rumah
181.3	Utang/ Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-Jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Tinggi
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tingkat Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen

183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verset
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan Hukum, Meliputi Kadarkum
183.5	Bantuan Hukum, meliputi LBH
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas Batas/ Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi Narapidana
186.2	Pembinaan Narapidana
186.3	Pembebasan Narapidana
186.4	Tahanan Titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntun Umum
187.2	Penuntun Khusus
188	Hukum Adat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing

194	Perwakilan RI di Luar Negri
195	PBB
196	Laporan Luar Negri
200	POLITIK
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan Dan Pemahaman Ideologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa
201.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporanya
201.4	Keadaan Politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi Dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam
201.6	Orde Baru
201.7	Orde Reformasi
210	KEPARTAIAN
211	Partai Politik
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program Kerja , Data Kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas / Musda PARPOL
211.5	Struktur / Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data Inventaris dan Keuangan PARPOL
212	Partai / Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan Pemburuan Partai / Organisasi terlarang
212.2	Daftar Dan Data Pengurus anggota Partai / Organisasi terlarang
212.3	Ijin meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang
212.4	Daftar Berkala Mengenai keadaan anggota Partai / Organisasi terlarang
212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota Partai Organisasi
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Pembentukan Oragnisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
221.3	Program Kerja Organisasi
221.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota

- 222 Pembinaan Organisasi
- 222.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 222.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 230 **ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**
- 231 Pembentukan Organisasi
- 231.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 231.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 231.3 Program Kerja Organisasi
- 231.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 232 Pembinaan Organisasi
- 232.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 232.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 240 **ORGANISASI PEMUDA**
- 241 Pembentukan Organisasi
- 241.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 241.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 241.3 Program Kerja Organisasi
- 241.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 242 Pembinaan Organisasi
- 242.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 242.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 250 **ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN**
- 251 Pembentukan Organisasi
- 251.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 251.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 251.3 Program Kerja Organisasi
- 251.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 252 Pembinaan Organisasi
- 252.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 252.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 260 **ORGANISASI WANITA**
- 261 Pembentukan Organisasi
- 261.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

- 261.2 Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
- 261.3 Program Kerja Organisasi
- 261.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 262 Pembinaan Organisasi
- 262.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 262.2 Daftar inventaris kekayaan organisasi
- 270 PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut/Tanda Gambar
- 273 Kampanye
- 273.1 Dana Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilu / Daftar Pemilu
- 276 Sarana
- 276.1 TPS
- 276.2 Kendaraan
- 276.3 Surat Surat
- 276.4 Kotak Surat
- 277 Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
- 278 Hasil Pemilu
- 278.1 Penetapan Terpilih dan Pembagian Kursi anggota legislatif
- 278.2 Penetapan Pemenang Pilkada
- 279 KPU / KPUD

- 280 **PENGAWASAN PEMILU / PILKADA**
- 281 Pemantauan
- 282 Pelanggaran
- 283 Sengketa
- 284 Panwaslu
- 300 **KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 300.1 Kebijakan Pemerintah Mengenai Situasi dan Kondisi keamanan
- 300.2 Pembinaan dan Pengaturan mengenai larangan

- 300.3 Pencegahan dan Penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ ketertiban umum
- 300.4 Program Kerja Serta tata cara penanggulangan keamanan

- 301 Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
- 302 Pengawasan Trantibum
- 303 Penegakan Pelaksanaan Perda
- 304 Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda
- 305 Patroli Wilayah

- 306 Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
- 306.1 Pengamanan
- 306.2 Pengawalan
- 307 Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan , ketentuan pelaksanaan dan pengawasan

- 310 **PERTAHANAN**
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Ketahanan Bangsa
- 315 Ketahanan Ekonomi
- 316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan kemasyarakatan

- 320 **KEMILITERAN / TNI**
- 321 Lathan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekaryaannya TNI
- 325 Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

- 330 **KEAMANAN**
- 331 Kepolisian
- 331.1 Polisi Pamong Praja
- 332 Huru-Hara / Demonstrasi
- 333 Senjata Api / Tajam
- 334 Bahan Peledak

- 335 Perjudian
- 336 Surat Surat Kaleng
- 337 Pengaduan Masyarakat
- 338 Himbauan atau Larangan

- 340 **PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)**
- 340.1 Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas

- 341 Pembinaan dan Diklat
- 341.1 Pengangkatan/ Pemberhentian anggota Linmas
- 341.2 Pendidikan/Latihan Linmas
- 341.3 Pelatihan PAM Swakarsa
- 341.4 Pendidikan/Latihan Linmas
- 342 Pengerahan dan pengendalian Linmas
- 343 Kesejahteraan bagi anggota Linmas
- 343.1 Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
- 343.2 Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
- 343.3 Santunan uang duka bagi anggota Linmas
- 343.4 Penghargaan bagi anggota Linmas

- 344 Data Linmas, MENWA, PAMSwakarsa
- 344.1 Linmas Lanjut usia
- 345 Orientasi Kesadaran Bela Negara
- 346 Kegiatan Pelaksanaan Linmas

- 350 **KEJAHATAN**
- 351 Makar / Pemberontakan / Terorisme
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan / Pencurian / Perampasan
- 354 Subvseri / Penyelundupan / Narkotika
- 355 Penipuan dan Pemalsuan
- 356 Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan
- 357 Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

- 357.1 Pelaporan
- 357.2 Penanganan Korban
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan Lainnya (traficking, hipnotis, dll)
- 360 **BENCANA**
- 360.1 Pelatihan
- 360.2 Surat Keputusan
- 360.3 Berita Acara
- 361 Gunung Merapi / Gempa / Tsunami
- 362 Banjir / Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
- 364 Kebakaran
- 364.1 Pemadaman Kebakaran
- 365 Kekeringan
- 366 Posko Bencana
- 367 Koordinasi / Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
- 368 MOU Pemerintah Pusat BNPB

370

KECELAKAAN

- 371 Latihan SAR
- 372 Latihan Ketrampilan Penyelamatan di Air dan menyelam
- 373 Pelatihan Managemen bagi pejabat
- 374 Satkorlak dan Satlak PBP
- 375 Pelatihan Kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
- 376 Latihan Ketrampilan Pemadam Kebakaran
- 377 Kecelakaan Darat, Laut, Udara
- 378 Investigasi / Penyelidikan Kecelakaan
- 379 Asuransi Kecelakaan
- 380 **PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**
- 381 Perencanaan
- 381.1 Perencanaan Teknis
- 381.2 Rekomendasi
- 382 Bantuan Bencana

383	Penanggulangan Bencana Dengan Pihak Lain
384	Sarana Prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan Lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi Pemerintah Pusat
392	Instansi Pemerintah di Daerah
393	Lembaga Internasional
394	Lembaga non Pemerntah Nasional
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
411	Gotong-royong
411.1	Swadaya gotong-royong
411.11	Pembinaan
411.12	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.3	Latihan Kerja Masyarakat
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411.6	Kelembagaan Desa
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Desa
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan

- 412.24 Bantuan / Stimulasi
- 412.25 Perkreditan Desa
- 412.26 Pelaporan
- 412.27 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
- 412.3 Koperasi Desa
- 412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- 412.32 Koperasi Unit Desa (KUD)
- 413 Sarana dan Prasarana Desa
- 413.1 Pemukiman Kembali Penduduk
- 413.2 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
- 413.3 Perbaikan Kampung
- 413.4 Teknologi Tepat Guna (TTG)
- 414 Pengembangan Desa
- 414.1 Perlombaan Desa Dan Kelurahan
- 414.11 Pedoman
- 414.12 Penilaian
- 414.13 Kejuaraan
- 415 Koordinasi
- 415.1 Kerjasama
- 415.11 Luar Negri
- 415.12 Perguruan Tinggi
- 415.13 Kementrian / Lembaga Pemerintah
- 415.14 Lembaga Lainnya

- 420 **PENDIDIKAN**
- 420.1 Kebijakan dan Program pemerintah Untuk Pendidikan
- 420.2 Pendidikan Karakter bangsa, wawasan Kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dsb
- 420.3 Pendidikan Kemasyarakatan
- 421 Sekolah (termasuk akreditasi)
- 421.1 Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
- 421.2 Sekolah Dasar
- 421.3 Sekolah Menengah
- 421.4 Sekolah Kejuruan

- 421.5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
- 421.6 Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
- 421.7 Kegiatan pelajar di antaranya reuni, darmawisata, widyawista, lomba-lomba (LKS, olimpiade olahraga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar
- 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- 421.9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - 422.1 Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSOEK
 - 422.2 Tahun Pelajaran
 - 422.3 Hari Libur
 - 422.4 Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
 - 422.5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
 - 422.6 Ijazah, Sertifikat
 - 422.7 Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM) Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 423 Metode Belajar
 - 423.1 Kuliah
 - 423.2 Ceramah, Simposium, Seminar
 - 423.3 Diskusi
 - 423.4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang / Praktek / PKL
 - 423.5 Kurikulum
 - 423.6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
 - 423.7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, Guru/dosen berprestasi)
 - 424.1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
 - 424.2 Sertifikat Guru
- 425 Sarana Pendidikan
 - 425.1 Bangunan Pendidikan
 - 425.11 Gedung Sekolah
 - 425.12 Kampus
 - 425.13 Pusat Kegiatan
 - 425.14 Perpustakaan
 - 425.15 Laboratorium
 - 425.2 Buku

- 425.3 Perlengkapan Pendidikan
- 425.4 Sistem Informasi Pendidikan
- 425.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
- 426 **KEOLAHRAGAAN**
- 426.1 Pembinaan Keolahragaan
- 426.11 Olahraga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
- 426.12 Olahraga Pendidikan (POPDA SD, Porseni, dll)
- 426.13 Olahraga Rekreasi / Masal (Senam, Sepeda Santai, Olahraga tradisional)
- 426.14 Iptek dan Industri Olah Raga
- 426.15 Sarana Prasarana Keolahragaan
- 426.2 Kemitraan Olah Raga
- 427**KEPEMUDAAN**
- 427.1 Pertukaran Pemuda
- 427.2 Paskibraka
- 427.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana Kegiatan Remaja :
Gelanggang Remaja
- 427.4 Kemitraan Pemuda
- 427.5 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan / Kepanduan
- 430 Kebudayaan
- 430.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan
- 430.2 Pembinaan Bidang Kebudayaan
- 431 Kesenian
- 431.1 Cabang Kesenian
(Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Lukis, dll)
- 431.2 Sarana
- 431.21 Gedung Kesenian
- 431.22 Padepokan
- 431.23 Lembaga Adat
- 431.24 Kegiatan Adat / tradisi
- 431.3 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan : Festival, Pentas Seni
- 432 Kepurbakalaan
- 432.1 Museum
- 432.2 Peninggalan Kuno
- 432.21 Candi, termasuk pemugaran

432.22	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
440	KESEHATAN
440.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Unit Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, PKK, Posyandu, dsb
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	JAMKESMAS
441.92	JAMKESDA
441.93	JAMPERSAL
441.94	Jaminan Lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan Obat
442.3	Penyimpanan Obat
442.4	Distribusi Obat
442.5	Pengawasan Obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan Obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta

443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T.B.C
443.25	Kholera
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainya
443.3	Pemberantasan penyakit menular sumber binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DBD
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptosirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan penyakit Tidak Menular
443.41	A.Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensis
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
443.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
443.49	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan penyakit lainya
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran Udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi

- 443.61 Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM),
Jasa boga
- 443.62 Sarana air minum
- 443.63 Pestisida, insektisida
- 443.64 Pencemaran
- 443.65 Jamban Keluarga, sanitasi rumah tangga
- 443.66 Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll
- 443.67 Higiene sanitasi CA. Mammae
- 443.68 Higiene sanitasi CA. Heper
- 443.69 Higiene sanitasi CA. Paru
- 443.7 Kejadian Khusus
- 433.71 Dekompensasiokordosis (Serangan Jantung)
- 433.72 Asma
- 433.73 Psikosis
- 433.74 PPOM
- 433.75 Kecelakaan Lalu Lintas
- 433.76 Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 444 Gizi dan Pengawasan Makanan
- 444.1 Kekurangan Makanan
- 444.2 Bahaya Kelaparan, busung lapar, gizi buruk
- 444.3
- Keracunan makanan
- 444.4 Menu makanan rakyat
- 444.5 Gondok endemik (GAKI)
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
- 445.1 Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
- 445.11 Rawat Inap
- 445.12 Rawat Jalan
- 445.13 IGD
- 445.14 IBS
- 445.15 ICU
- 445.16 MCU (Medical Check Up)
- 445.2 Penunjang Medis
- 445.21 Farmasi

445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Darah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD/ Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Intern)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditsi
445.62	ISO
445.63	PSBH (Problem Solving For Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi Layanan Kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan Untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/ Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis
446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi
447.4	Perijinan Berkaitan dengan Alat Kesehatan

- 448 Pengobatan Alternatif
- 448.1 Pijat
- 448.2 Akupuntur
- 448.3 Jamu dan Herbal
- 448.4 Dukun
- 449 Lembaga Penyediaan layanan Kesehatan
- 449.1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS keliling
- 449.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
- 449.3 Rumah Bersalin
- 449.4 Posyandu
- 449.5 Laboratorium Kesehatan
- 449.6 Apotik
- 449.7 Sanatorim Kesehatan
- 450 **AGAMA**
- 450.1 Kebijakan dan Program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
- 450.2 Bantuan di bidang Keagamaan
- 451 Islam
- 451.1 Peribadatan
- 451.11 Sholat
- 451.12 Zakat, Infaq, Shodaqoh
- 451.13 Puasa
- 451.14 Umrah dan Haji
- 451.2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
- 451.3 Tokoh Agama
- 451.4 Pendidikan Agama
- 451.41 Pendidikan Tingkat Agama
- 451.42 Menengah,MTs,MA
- 451.43 Dasar, Pra Sekolah, MI
- 451.44 Lembaga Pendidkan Non Formal (TPQ / Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
- 451.45 Sarana Pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll
- 451.46 Tenaga Pengajar
- 451.47 Dakwah (Pengajian MTQ)
- 451.5 Wakaf

- 451.6 Mazhab Agama Islam
- 451.7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rakyat dll)
- 451.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- 452 Kristen Protestan
- 452.1 Peribadatan
- 452.2 Rumah Ibadah Gereja dll
- 452.3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
- 452.4 Mazbah Agama Kristen Protestan
- 452.5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
- 453.1 Peribadatan
- 453.2 Rumah Ibadah Gereja dll
- 453.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 453.4 Mazhab Agama Khatolik
- 453.5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
- 454.1 Peribadatan
- 454.2 Rumah Ibadah Pura dll
- 454.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 454.4 Mazhab Agama Hindu
- 454.5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
- 455.1 Peribadatan
- 455.2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
- 455.3 Tokoh Agama Rohaniawan
- 455.4 Mashab Agama Budha
- 455.5 Organisasi Agama Budha
- 456 Kong Hu Cu
- 456.1 Peribadatan
- 456.2 Rumah Ibadah Klenteng dll
- 456.3 Tokoh Agama Rohaniawan
- 456.4 Mashab Agama Kong Hu Cu
- 456.5 Organisasi Agama Kong Hu Cu

- 460 **SOSIAL**
- 461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
- 461.1 Cacat Ganda
- 461.2 Cacat Fisik
- 461.3 Cacat Mental
- 462 Rehabilitasi Sosial
- 462.1 Gelandangan/Orang Terlantar, anak jalanan
- 462.2 Pengemis
- 462.3 Tuna Susila
- 462.4 Anak Nakal
- 462.5 Tuna Wisma

- 463 Kesejahteraan anak dan keluarga
- 463.1 Kesejahteraan anak
- 463.11 Pengarutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
- 463.12 Perlindungan Anak
- 463.13 Anak Asuh
- 463.2 Kualitas Hidup Perempuan
- 463.21 Perlindungan Perempuan
- 463.22 Ibu Teladan
- 463.23 Pengarutamaan Gender (PUG)

- 464 Keperintisan dan Kepahlawanan
- 464.1 Pahlawan Meliputi Penghargaan Kepada Pahlawan, tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya
- 464.2 Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, Penghargaan dan tunjangan Kepada Perintis Kemerdekaan
- 464.3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
- 465.1 Lanjut Usia
- 465.2 Korban Kekacauan, Pengungsian, rehabilitasi
- 465.3 Masyarakat Miskin : Raskin, BLT dll
- 466 Sumbangan Sosial
- 466.1 Korban Bencana

- 466.11 Jaminan Sosial
- 466.2 Pencarian Dana untuk Sumbangan : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar dsb
- 466.3 Panti Asuhan
- 467 Bimbingan Sosial
- 467.1 Masyarakat Suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
- 468 PMI
- 469 Makam
- 469.1 Umum
- 469.2 Pahlawan
- 469.3 Khusus, Keluarga, Raja
- 469.4 Krematorium
- 470 **KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
- 470.1 Kebijakan dan Program Pemerintahan Dan Kependudukan
- 471 Pendaftaran Penduduk
- 471.1 Identitas Penduduk
- 471.11 Biodata
- 471.12 Nomor Induk Kependudukan
- 471.13 Kartu Tanda Penduduk
- 471.14 Kartu Keluarga
- 471.15 Advokasi Identitas Penduduk
- 471.2 Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia
- 471.21 Perpindahan Penduduk WNI
- 471.22 Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia
- 471.23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
- 471.24 Daerah Terbelakang
- 471.25 Bedol Desa
- 471.3 Perpindahan Penduduk antar Negara
- 471.31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
- 471.32 Orang Asing Tinggal Sementara
- 471.33 Orang Asing Tinggal tetap
- 471.34 Perpindahan Penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (Pelintas Batas Tradisional)

- 471.4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
- 471.41 Akibat Bencana Alam
- 471.42 Akibat Kerusakan Sosial
- 471.43 Pendaftaran Penduduk Daerah terbelakang
- 471.44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
- 472.1 Kelahiran, Kematian, dan Advokasi
- 472.11 Kelahiran
- 472.12 Kematian
- 472.13 Advokasi
- 472.2 Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi
- 472.21 Perkawinan Agama Islam
- 472.22 Perkawinan Agama Non Islam
- 472.23 Perceraian Agama Islam
- 472.24 Perceraian Agama Non Islam
- 472.25 Advokasi
- 472.3 Pengangkatan Pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
- 472.31 Pengangkatan Anak
- 472.32 Pengakuan Anak
- 472.33 Pengesahan Anak
- 472.34 Perubahan akta
- 472.35 Pembatalan Akta
- 472.36 Advokasi
- 472.4 Pencatatan Kewarganengaraan
- 472.41 Akibat Perkawinan
- 472.42 Akibat Kelahiran
- 472.43 Non Perkawinan / Non Kelahiran
- 472.44 Naturalisasi
- 472.45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
- 473.1 Teknologi Informasi
- 473.2 Pengolahan Data Kependudukan

- 473.21 Pendaftaran Penduduk
- 473.22 Kejadian Vital Penduduk
- 473.23 Penduduk Non Registrasi
- 473.3 Pelayanan informasi kependudukan
- 474 Perkembangan Penduduk
- 474.1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
- 474.11 Struktur Jumlah
- 474.12 Komposisi
- 474.13 Fertilitas
- 474.14 Kesehatan Reproduksi
- 474.15 Morbiditas Penduduk
- 474.16 Mortalitas Penduduk
- 474.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
- 474.21 Anak dan Remaja
- 474.22 Penduduk usia Produktif
- 474.23 Penduduk Lanjut Usia
- 474.24 Gender
- 474.3 Penataan Persebaran Penduduk
- 474.31 Migrasi antar Wilayah
- 474.32 Urbanisasi
- 474.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
- 474.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan

- 475 **TRANSMIGRASI**
- 475.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
- 475.11 Informasi Potensi Peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
- 475.12 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.13 Per masyarakatan / sosialisasi transmigrasi
- 475.14 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media masa dalam penyampaian informasi transmigrasi
- 475.15 Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
- 475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
- 475.17 Kerjasama di bidang transmigrasi
- 475.18 Kepulauan transmigrasi karena daerah terjadi konflik

- 475.2 Pemukiman transmigrasi
- 475.21 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
- 475.22 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
- 475.23 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
- 475.24 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi / peta informasi pemukiman
- 475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum / sosial dan jaringan transportasi
- 475.26 Tanah Pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya identifikasi , pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
- 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
- 475.28 tata ruang pemukiman transmigrasi
- 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
- 475.282 Rancangan kapling TSM
- 475.283 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
- 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
- 475.285 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
- 475.286 Pengukuran dan batas unit pemukiman
- 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.29 Sarana pemukiman transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan pengadalan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.292 Pembinaan dan Pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475.293 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan sumber energi
- 475.294 Pembinaan dan Pengendalian peningkatan sarana
- 475.295 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
- 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.32 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
- 475.33 Pengerahan
- 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi
- 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigrasi
- 475.333 Transmigrasi yang dinyatakan lulus penyaringan
- 475.34 Pemberangkatan transmigrasi
- 475.341 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara dan darat
- 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan dan pemberangkatan
- 475.343 Pengawasan perjalanan transmigran

- 475.344 Pengawasan perjalanan transmigran
- 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
- 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
- 475.35 Penempatan transmigran
- 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
- 475.352 pendataan transmigran di lokasi yang masih di bina
- 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
- 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (transito) dan pelatihan transmigran
- 475.41 Pelatihan transmigran
- 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
- 475.412 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
- 475.413 Penyusunan calon peserta / pelatihan
- 475.42 Penampungan transmigran di transito
- 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
- 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
- 475.423 Pelayanan pembekalan / peralatan bagi transmigran
- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigrasi
- 475.51 Identifikasi dan penjajagan pembina
- 475.511 Identifikasi , analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- 475.512 Identifikasi , analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- 475.513 Identifikasi , analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
- 475.52 Pembinaan Pendidikan
- 475.521 Penyediaan / penyiapan tenaga pendidikan dan status
- 475.522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
- 475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
- 475.54 Pembinaan kesehatan
- 475.541 Penyediaan sarana kesehatan
- 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- 475.543 Pendistribusian bantuan pangan
- 475.55 Pembinaan rokhani

- 475.551 Pembinaan mental sepiritual dan penyediaan petugas agama
- 475.552 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
- 475.553 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial

- 475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi
- 475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan
- 475.58 Penilaian transmigran teladan
- 475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
- 476 **KELUARGA BERENCANA**
- 476.1 Alat Kontrasepsi
- 476.2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
- 476.3 Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
- 476.4 Pos KB Desa
- 476.5 Akseptor KB

- 480 **MEDIA MASSA**
- 480.1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
- 481 Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutanijin bila terjadi pelanggaran
- 481.1 Surat Kabar
- 481.2 Majalah
- 481.3 Buletin
- 481.4 Jurnal
- 481.5 Press Release, klarifikasi berita, press statistik
- 481.51 Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
- 481.52 Perekonomian dan Perbankan
- 481.53 Bidang lainnya
- 481.6 Layanan informasi / Leaflet
- 481.7 Masukan analisis Gubernur
- 482 Media elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
- 482.1 Radio
- 482.2 Televisi
- 482.3 Film Dokumenter
- 482.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran

- 482.5 Kelompok Pemantau Isi Siaran
- 482.6 Pengkajian Isi Siaran
- 482.7 SDM Penyiaran

- 483 Periklanan
- 483.1 Penentuan Pemasangan Reklame
- 483.2 Pameran

- 484 Kewartawanan / Jurnalistik
- 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi
- 484.2 Kasus -kasus Kewartawanan
- 484.3 Penyalahgunaan Profesi
- 484.4 Bantuan kepada / dari Organisasi Profesi Wartawan
- 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
- 484.6 Pendidikan Jurnalistik Khusus Wartawan
- 484.7 Temu Pers / Konferensi Pers
- 484.8 Pers Tour
- 484.9 Kunjungan Wartawan Asing
- 485 Penyuluhan Masyarakat
- 485.1 Publikasi
- 485.2 Pendirian Information Center

- 486 Pembinaan bidang Infokom
- 486.1 Training Fotografi
- 486.2 Training Berita Jurnalistik
- 486.3 Bintek Infokom
- 486.4 Rakorda Infokom
- 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
- 486.6 Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- 487 Hubungan Antar Lembaga
- 487.1 Non Pemerintah
- 487.11 Wahana Komunikasi Masyarakat

487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumnas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar negeri
487.31	Promosi Luar Negeri
487.32	Kunjungan Wartawan Asing
488	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Informasi
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynot Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
489.2	Dialog Interaktif
489.3	Rubrik
489.4	Materi / pointers Sambutan, Paparan, naskah Keynote Speaker Rubrik dan Dialog Interaktif
489.5	Pembuata Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan Stabilitas
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada Umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya
510	PERDAGANGAN
510.1	Promosi Perdagangan
510.11	Pekan Raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran hasil Industri
510.23	Penentuan harga pokok

510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan pelaporan
510.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Penerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Ijin Pinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdagangan antar Pulau
510.51	Kerjasama bahan Baku
510.52	Industri Pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	Tera
510.61	Tera dan Tera Ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anak timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda Tera
510.66	Biaya tera
510.7	Bantuan Peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian / Kontrak
510.73	Serah trima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian

510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukuran Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter termasuk di dalamnya listrik dan PDAM
510.936	S P B U
511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, Kaki lima, kios
511.4	Pusat Perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor hasil industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.4	Managemen Perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri
512.51	Kebijakan
512.52	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan Eksport Barang
512.7	Pengawasan Mutu Barang
512.8	Eksportir terdaftar
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian Ijin
513.12	Pengendalian Ijin

- 513.2 Standart Mata Dagang Import
- 513.3 Managemen Perdagangan Internasional
- 513.4 Kegiatan Import
- 513.41 Pembinaan Import
- 513.42 Pengendalian Import
- 513.43 Pemantauan Import
- 513.5 Faktor-faktor Pendukung
- 513.6 Pengawasan Mutu Barang Import
- 513.7 Penyaluran Kegiatan Import
- 513.71 Bahan Konsumsi
- 513.72 Bahan Baku
- 513.73 Bahan Penolong
- 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan antar Pulau
- 514.1 Kerjasam bahan baku
- 514.2 Industri Pemasaran
- 514.3 Kontrak
- 515 Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negri
- 515.1 Promosi dan Informasi
- 515.2 Pameran
- 515.3 Kerjasama
- 516 Pergudangan, termasuk tanki penyimpanan minyak goreng
- 516.1 Peti Kemas
- 516.2 Tanki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 **KOPERASI**
- 518.1 Bina Usaha Koperasi
- 518.11 Koperasi Pertanian
- 518.12 Koperasi Non Pertanian
- 518.13 Permodalan Koperasi
- 518.131 Pemupukan Modal
- 518.132 Pemanfaatan Modal
- 518.133 Perbankan Dan Asuransi

518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi bahan pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Keragaan koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Penyelesaian / Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi

518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan / Manager Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	Tenaga kerja Sukarela Terdidik (TKST)
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda Kepada Koperasi / KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Seknder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntan
518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
520	PERTANIAN

521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan program
521.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultura (Sayuran, Buah-buahan, tanaman hias)
521.24	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi traktor dan sebagainya
521.33	Pembenihan dan Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Pangan
521.411	Penyakit Tanaman Pangan
521.412	Hama Tanaman Pangan
521.42	Pemberantasan
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendalian Hayati
521.5	Pengusaha Petani
521.6	Lahan Kritis
521.7	Pemasaran Dan Promosi Pertanian
521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
522	KEHUTANAN
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan

522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendapatan / Inventarisasi Areal Hutan
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konsevasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Ruang Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetep
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	SK HPH
522.312	Kerjasama
522.313	Pembatalan / Penolakan
522.32	Modal Dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca Pengusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi kayu

522.353	Produksi Non Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non -HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI Pertukaran
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha Pertanian
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana Desa
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.47	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.51	Konservasi Jenis
522.511	Satwa yang dilindungi
522.512	Satwa yang tidak dilindungi
522.513	Lembaga Konservasi Satwa
522.514	Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)

522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman Hutan Raya/Kebun Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL,UPL,Di Dalam Kawasan
522.532	Amdal UKL,UPL,Di Luar Kawasan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pencinta Alam
522.542	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS
522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan
522.556	Sengketa Hutan
522.557	Hama dan Penyakit
522.558	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.559	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.61	Pembenihan dan Pembibitan
522.611	Tegakan Benih
522.612	Pengadaan Benih
522.613	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.614	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
522.617	Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat

522.62	Tanaman Reboisasi
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi Lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi Tanah dan Air
522.625	Pengendalian Perladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	Perhutanan Nasional
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
522.633	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi
522.71	Hutan Produksi Terbatas
522.72	Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi
522.8	Kawasan Lindung
523	PERIKANAN DAN KELAUTAN
523.1	Rencana,Program ,Statistik,Prospek dan Pelopor bidang perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan Budidaya : CBIB,CBIC
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pelatihan Nelayan
523.32	Pembinaan Wanita nelayan
523.33	Fasilitas perajinan : SIUP, SIPI , SKP
523.34	Perbenihan
523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
523.41	Ekspor Hasil Perikanan
523.42	Impor Hsil perikanan
523.43	Pemasaran Dalam Negri

- 523.44 Pengusaha Perikanan
- 523.5 Sarana Perikanan
- 523.51 Pelabuhan Perikanan Petani
- 523.52 TPI/PPI
- 523.53 Kesyahbandara
- 523.54 Peralatan penangkapan : kapal , perahu , jaring, pump dsb
- 523.6 Pengendalian Hama Dan Penyakit Tanaman Pangan
- 523.61 Penyakit hama
- 523.62 Hama Ikan
- 523.63 Obat-Obatan termasuk sertifikatnya
- 523.7 Konservasi dan suaka Laut
- 523.71 Transplantasi bibit karang
- 523.72 Trumbu karang
- 523.73 Mangrove
- 523.74 Garam
- 523.75 Harta Karun di dalam laut
- 523.76 Pembinaan /Pendidikan masyarakat pesisir
- 524 PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
- 524.1 Produksi
- 524.11 Perbibitan
- 524.12 Penyebaran dan Pengembangan peternakan
- 524.13 Budidaya
- 524.2 Usaha peternakan
- 524.21 Peleyanan usaha
- 524.22 pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 524.23 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakaan
- 524.3 Kesehatan Hewan
- 524.31 Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan
- 524.32 Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan
- 524.33 Obat - obatan Hewan
- 524.34 Pelayanan Kesehatan Hewan
- 524.4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 524.41 Zonosis dan Kesejahteraan Hewan

524.42	Hygieni dan Sanitasi
524.43	Produk Hewani
524.5	Laboratorium Kesehatan Hewan
524.51	Pengujian Mutu Asal Hewan
524.52	Pengujian Mutu Produk Bahan Asli Hewan
524.6	Inseminasi Buatan
524.61	Produksi Distribusi dan Pemasaran
524.62	Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
524.7	Pembibitan dan Budi Daya Ternak
524.71	Ternak Non Ruminansia
524.72	Ternak Ruminansia
525	PERKEBUNAN
525.1	Program dan Pelaporan
525.11	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
525.12	Monitoring
525.13	Statistik Perkebunan
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	The
525.23	Tembakau
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/kopra/Kelapa sawit
525.27	Kopi
525.28	Kakao
525.29	Jenis Tanaman yang lain
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Benih
525.32	Pembibitan
525.33	Kelompok Tani
525.34	Kemitraan
525.35	Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
525.36	Pemasaran Hasil Perkebunan

525.4	Perlindungan Tanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	Agensia Pengendalian Hayati
525.5	Alat Dan Mesin Perkebunan
525.51	Power Sprayer
525.52	Hand sprayer
525.53	Polibag
525.54	Alat Laboratorium Perkebunan
525.55	Reagen
525.56	Sarana / Aalat Produksi Perkebunana
525.6	Pengolahan lahan
525.61	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.71	Penyuluhan
525.72	Sosialisasi
525.73	Informasi
526	KETAHANAN PANGAN
526.1	Program Bimbingan Masal
526.2	Penegembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinana Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.31	Mutu Hasil
526.32	Pengelola Hasil Pangan
526.33	Pemasaran Hsil
526.34	Kementrian
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan pola Distribusi
526.42	Sarana dan prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaaan dan Keanekaragaan Pangan

526.51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan

526.52 Poal Konsumsi Pangan Masyarakat

526.53 Sistem Informasi Pangan

527 PENYULUHAN

527.1 Sumber Daya Manusia

527.11 Penyuluh

527.12 Pelaku Utama Pelaku Usaha

527.13 Stake holder

527.2 Kelembagaan

527.21 Struktural

527.22 Non struktural

527.23 Pelaku Utama Pelaku Usaha

527.24 Lembaga Profesi

527.3 Penyelenggaraan Penyuluhan

527.31 Program / metode

527.32 Promosi / pameran/ kampanye

527.33 Penghargaan / lomba

527.34 Materi

530 PERINDUSTRIAN

530.1 Undang - undang Gangguan

531 Industri Logam

532 Industri mesin / elektronik

533 Industri Kimia/Farmasi

534 Industri Tekstil

535 Industri Makanan/ Minuman

536 Aneka industri /perusahaan

536.1 Home Industri

537 Aneka Kerajinan

537.1 Kerajinan Rakyat

538 Usaha Negara

538.1 Perjan

538.2 Perum

538.3 Persero

539	Perusahaan Daerah
540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	Minyak dan Gas Bumi
541.1	Pengusahaan
541.11	Perajinan
541.12	Rekomendasi
541.13	Kontrak Karya
541.14	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki , pompa, tanker
542	Energi
542.1	Energi alternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	Energi baru terbarukan
542.15	Perijinan
542.16	Rekomendasi
542.17	Pembinaan dan pengawasan
542.2	Konservasi energi
542.3	Pemetaan energi
542.4	Rencana umum perencanaan energi daerah (RUPED)
543	Pertambangan, mineral dan batubara
543.1	Wilayah usaha pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP batuan
543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP Operasi produksi
543.33	IUP Operasi khusus

543.34	Ijin usaha jasa pertambangan
543.35	Pencabutan ijin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan usaha pertambangan
543.52	Penerbitan kegiatan pertambangan
543.6	Pasca tambang
543.61	Reklamasi
543.62	Penutupan
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	ImbuhanCAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga dasar air/Nilai perolehan air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi
545.3	Vulkanologi
545.31	Pengawasan Vulkanologi
545.32	Panas Bumi
545.4	Hidrogeologi
545.5	Gerakan Tanah (longsoran,amblesan)
545.6	Pengawasan ,pengendalian

546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan energi
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan darat
551.1	Lalu lintas Jalan raya, sungai ,danau
551.11	Keamanan Lalu lintas ,rambu-rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinana
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan Timbang/Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan ,Rambu - Rambu
551.32	Lalu lintas
551.33	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana / Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan ,Rambu - Rambu
551.42	Lalu lintas
551.43	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.47	Terminal
551.48	Kecelakaan
551.49	Perizinan
551.5	Perkreta-Apian

551.51	Sarana meliputi Lokomotif ,Gerbong,Bogie
551.52	Prasarana(Jalan /jembatan)
551.53	Trayek
551.54	Angkutan penumpang
551.55	Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/ Perbaikan
551.59	Perizinan
552	Perhubungan laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negri
552.12	Pelayaran Luar Negri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran charter/wisata Turis
552.15	Pelayaran Khusus
552.16	Keamanan Lalu lintas ,rambu-rambu
552.2	Perkapalan -Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton /Tongkong
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal kontainer
552.3	Pelabuhan
552.31	Tanah /Lokasi
552.32	Alur Layar
552.33	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal kontainer
552.36	Bangunan /gedung/gudang

552.37	Perlengkapan Tambat Labuh
552.38	Lapangan Penumpang
552.39	Pelabuhan khusus
552.4	Pengerukan /Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	Patroli Perairan
552.53	Penjagaan pantai & Penanggulangan Keselamatan dilaut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	Pos
552.62	Minyak
552.63	Log
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan Pokok
552.66	Peti Kemas /EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negri,Barang Luar Negri
552.69	Bongkar Muatan
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu - rambu /Mercu Suar
552.72	Kelaikan Kapal/ Pembangunan Kapal
552.73	Fasilitas Keselamatan /Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	Sertifikasi Kesmpurnan Kapal
552.76	Sertifikasi Awak Kapal
552.8	Kecelakaan, Gangguan
552.81	Kecelakaan penumpang Kapal
552.82	Kecelakaan Barang

552'83	Gangguan Sarana /Prasarana
552.84	Pembajakan /Penyeludupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Laut
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.11	Penerbangan Domestik
553.12	Penerbangan luar negeri
553.13	Penerbangan Haji
553.14	Penerbangan Charter /Non Reguler
553.15	Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah /Lokasi
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang
553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan /gedung
553.27	Perlengkapan
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan
553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	Pos

553.42	Muatan Dalam Negri
553.43	Muatan Luar Negri
553.44	EMPU
553.5	Sertifikasi Kelaikan
553.51	Kelaikan Pesawat Udara
553.52	Kelaikan Peralatan Penunjang
553.53	Kelaikan Personil /Awak Kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu- rambu
553.62	Perakitan /Kalibrasi
553.63	Fasilitas Keselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan / Gangguan
553.71	Kecelakaan Penumpang
553.72	Kecelakaan Branga
553.73	Gangguan Sarana /Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi
553.82	Asosiasi
553.83	SATPAM
553.84	Rally Udara / Lomba
553.9	Perizinan
553.91	Izin Terbang / Flight Approval
553.92	Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU
553.93	Pembukaan kantor Cabang
553.94	Rekomendasi Ketinggian Bangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
554	POS
554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan Fasilitas
554.12	Rehabilitasi / Perawatan

- 554.13 Bina Usaha / Pengawasan / Penertiban
- 554.14 Standarisasi Perangkat
- 554.15 Tanah / Bangunan
- 554.16 Filateli
- 554.17 Asosiasi
- 554.18 Laporan dan Evaluasi
- 554.2 Pelayanan
- 554.21 Jasa Pos
- 554.22 Jasa Titipan
- 554.23 Jasa Giro
- 554.24 Benda Pos / peranko
- 554.25 Sampul Peringatan
- 554.26 Jasa Pos Elektronik
- 554.3 Perijinan
- 554.31 Rekomendasi Usaha Jasa Pos /Titipan
- 554.32 Pembukaan Agen / Cabang
- 554.4 Gangguan Sarana /Prasarana
- 554.41 Kecelakaan
- 554.42 Sabotase
- 554.43 Penyeludupan
- 555 **Teknologi Informasi****
- 555.1 Kebijakan
- 555.2 Peralatan
- 555.21 Telepon
- 555.22 Internet / USO
- 555.23 Telegram ,Telex/ SBB, Faximile
- 555.24 Satelit, Stasiun Bumi
- 555.25 Radio Komunikasi
- 555.3 Sistem
- 555.4 Pembinaan /Penertiban
- 555.5 Perijinana
- 556 **Pariwisata dan rekreasi****
- 556.1 Usaha pariwisata

556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.112	Restoran dan Rumah Makan
556.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	Usaha sarana Pariwisata
556.141	ijin Pariwisata
556.142	Ijin Usaha Pariwisata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin pengusaha Obyek dan Daya Tari Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Priwsata
556.161	Dalam Negri
556.162	Luar Negri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
556.3	Travel Service
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan /Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata (Visa , Bea Cuaki, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan daya tarik wisata
556.411	ciptaan tuhan
556.412	Hasil karya manusia
556.42	Rehabilitas / perawatan
556.43	pengembangan fasilitas
556.44	tanah / bangunan

556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga kepariwisataan
557	Matereologi
557.1	Curah hujan
557.2	Hujan buatan
557.3	Peneropongan bintang
560	TENAGA KERJA
560.1	Data permintaan TKI / TKW Dari luar negri
560.11	Data persiadaan TKI / TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker Ke luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TK / TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	Pemohonan Rekomondasi Passport
560.52	Perjanjian Kerja TKI / TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar nergi
560.55	Pelatihan TKI / TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkat TKI / TKW Ke Luar Negeri
560.63	Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI / TKW Ilegal
560.73	TKI / TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah

- 561.1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
- 561.2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Provinsi
- 561.3 Kebutuhan Fisik Minimum
- 561.4 Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
- 561.5 Laporan Data Remittance
- 561.6 Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW
- 562 Penempatan
 - 562.1 Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
 - 562.11 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
 - 562.12 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
 - 562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha / Peluasan Kerja
 - 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
 - 562.3 Lembaga Penyalur Naker
 - 562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
 - 562.32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jsa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
 - 562.33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI,BKK,BKS)
- 563 Latihan kerja
 - 563.1 Pendidikan Pekerja
 - 563.11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - 563.12 Diklat Di dalam Negri (PKL ,Prakerin,OJT)
 - 563.13 Diklat DI luar Negri (Pemagangan)
 - 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - 563.21 Tempat pelatihan (BLK)
 - 563.22 Instruktur / Pelatihan
 - 563.23 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
 - 563.24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
 - 563.25 Sertifikat
 - 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Suka rela
 - 564.1 Butsi

- 564.2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Pekerja
 - 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
 - 565.11 Pengaduan Perkara pekerja / NAKER
 - 565.12 Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
 - 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja /NAKER
 - 565.14 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
 - 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
 - 565.16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/ P4P)
 - 565.17 Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
 - 565.18 Daftar Usulan ,Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/ P4P)
 - 565.2 Pemogokan /Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
 - 566.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - 566.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
 - 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 566.5 Pelatihan Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
 - 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
 - 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
 - 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - 566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/ angkut)
 - 566.82 Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
 - 566.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
 - 566.84 Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan
 - 566.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
 - 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam Hari (sifht malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
 - 567.2 PHK Masal
 - 567.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.4 Ijin Melakukan PHK

- 567.5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
- 567.6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK
- 567.7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja
- 568.1 Bantuan Kredit/ bantuan Modal Kerja bagi Naker
- 568.1.1 Pemilihan Pekerja Teladan
- 568.2 Perumahan Pekerja
- 568.3 Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
- 568.4 Koperasi Pekerja
- 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
- 568.6 Perpustakaan Pekerja
- 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
- 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
- 568.9.1 Lembaga Kerjasama Bipartid
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
- 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing(IKTA)
- 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- 569.4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
- 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
- 569.6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
- 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- 569.8 Pemberdayaan Dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
- 569.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PENANAMAN MODAL**
- 570.1 Penanaman Modal Dalam Negeri
- 570.2 Penanaman Modal Asing
- 571 Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
- 572 Pasar Uang Dan Modal
- 573 Saham
- 580 PERBANKAN MONETER**
- 581 Kredit

582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Bank Jateng
584.2	BKK,BPR BKK, Bank Pasar
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung Atau Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran meliputi check,giro,wesel,transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan Dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data,Peta Dan Publkasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Objek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
592.2	Ganti Rugi

- 592.21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
- 592.22 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
- 592.23 Ganti Rugi Tanah Absentee
- 592.24 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
- 592.25 Ganti Rugi Tanah Partikelir
- 592.26 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
- 592.3 Bagi Hasil
- 592.31 Penetapan Imbangan Gadai Tanah
- 592.32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
- 592.33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
- 592.4 Gadai Tanah
- 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
- 592.42 Pelaksanaan Gadai Tanah
- 592.43 Sengketa Gadai Tanah
- 592.5 Bimbingan dan Penyuluhan
- 592.6 Pengembangan
- 592.7 Yayasan Dana Landrefrom(YDL)
- 593 Pengurusan Hak-hak Tanah
- 593.1 Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
- 593.11 Sewa Tanah
- 593.12 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu:
Tebu,Tembakau,Rosela,Coorchorus
- 593.2 Hak Milik
- 593.21 Perorangan
- 593.22 Badan Hukum
- 593.3 Hak Pakai
- 593.31 Perorangan
- 593.311 Warga Negara Indonesia
- 593.312 Warga Negara Asing
- 593.32 Badan Hukum
- 593.321 Badan Hukum Indonesia
- 593.32 Badan Hukum Asing, Kedutaan Konsulat,Kantor dagang Asing
- 593.33 Tanah Gedung-gedung Negeri

593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB(Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda-PBK no.5/56
593.55	Pemulihan Hak (Penpres 4/1960)
593.6	Hak Pengelolaan
606.6	Terhadap Serangga
606.7	Terhadap Radiasi Atom
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
611.1	Bangunan Waduk
611.11	Bendungan
611.12	Tanggul
611.13	Pelimpahan Banjir
611.14	Menara Pengambilan
611.15	Pembangunan Dermaga
611.2	Bangunan Pengambilan
611.21	Bendungan
611.22	Bendungan Dengan Pintu Bilas
611.23	Bendungan Dengan Pompa
611.24	Pengambilan Bebas
611.25	Pengambilan Bebas Dengan Pompa
611.26	Sumur Dengan Pompa
611.27	Kantung lumpur
611.28	Silf Ekstretor
611.29	Escope Chenel

611.3	Bangunan Pembawa
611.31	Saluran
611.311	Saluran Induk
611.312	Saluran Sekunder
611.313	Suplesi
611.314	Tersier
611.315	Saluran Kwarter
611.316	Saluran Pasangan
611.317	Saluran Tertutup/Terowongan
611.32	Bangunan
611.321	Bangunan Bagi
611.322	Bangunan Dan Sadap
611.323	Bangunan Sadap
611.324	Bangunan Check
611.325	Bangunan Terjun
611.33	Bax Tersier
611.34	Got Miring
611.35	Talang
611.36	Syphon
611.37	Gorong-gorong
611.38	Pelimpahan Samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.41	Saluran
611.411	Saluran Pembuangan Induk
611.412	Saluran Pembuangan Sekunder
611.413	Saluran Pembuangan Tersier
611.42	Bangunan
611.421	Bangunan Out let
611.422	Bangunan Terjun
611.423	Bangunan Penahan Banjir
611.44	Talang Pembuang
611.45	Syphon Pembuangan
611.5	Bangunan Lainnya

611.51	Jalan
611.511	Jalan Inspeksi
611.512	Jalan Logistik
611.52	Jembatan
611.521	Jembatan Inspeksi
611.522	Jembatan Hewan
611.53	Tangga Cuci
611.54	Kubangan Kerbau
611.55	Waduk Lapangan
611.56	Bangunan Penunjang SAMPAI INI
611.57	Jaringan Telepon
611.58	Stasiun Argo
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612	Polder
612.1	Tanggul Keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan Penutup Sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran Muka
612.212	Saluran Pembawa Induk
612.213	Saluran Pembawa Sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukkan
612.22	Bangunan Bagi
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluran Pembawa Induk
612.322	Saluran Pembawa Sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan

612.4	Bangunan Lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bagunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	Bangunan Pembuangan
613.21	Saluran Pembawa Induk
613.22	Saluran Pembawa Sekunder
613.23	Saluran Pembawa Tersier
613.24	Saluran Penyimpanan Air
613.25	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan Lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman

614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut
614.15	Krib
614.16	Kantung lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Permukaan (Danau,Waduk,Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuangan
616.4	Bangunan Lainnya
620	JALAN
621	Jalan Kota/Kabupaten
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan

621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah Petugas Eksploitasi
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah (earth work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi Bawah
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong-gorong (culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Sampingan
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Perlengkap Dan Pengaman
621.91	Rambu- rambu/ Tanda -Tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas

621.94	Patok-Patok KM
621.95	Patok-Patok R.O.W. (Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Propinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.16	Kantor/ Gedung Proyek
622.17	Barak Kerja
622.18	Laboratorium Lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (earth work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (pavement)
622.31	Lapis Pondasi Bawah
622.32	Lapis Pondasi Bawah
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (culvert)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium

622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah Samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkap Dan Pengaman
622.81	Rambu-Rambu
622.82	Lampu Penerangan
622.83	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
622.84	Patok-Patok KM
622.85	Patok-Patok R.O.W. (Sempadan)
622.86	Rel Pengamanan
622.87	Pagar
622.88	Turap Penahan
622.89	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Daerah Penguasaan
623.2	Badan Jalan
623.3	Perkerasan (lapisan pondasi, lapis permukaan)
623.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
623.5	Median
623.6	Daerah Samping
623.7	Bangunan Pelengkap Dan Pengaman
630	JEMBATAN
631	Jembatan Pada Jalan Kota/ Kabupaten
631.1	Daerah Penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan Sementara
631.21	Jalan Sementara

631.22	Jembatan Sementara
631.23	Kantor Proyek
631.24	Gedung Proyek
631.25	Barak Kerja
631.26	Laboratorium Lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian Tanah
631.32	Timbunan Tanah
631.4	Podasi
631.41	Pondasi Kepala Jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi Angker
631.5	Bangunan Bawah
631.51	Kepala Jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan Orang/Trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang Air
631.7	Bangunan Pengaman
631.71	Turap/ Penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupute
631.76	Krip
631.8	Bangunan Pelengkap

631.81	Rambu-Rambu/ Tanda-Tanda Lalu Lintas
631.82	Patok Pengamanan
631.83	Patok R.O.W.(Sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Mediun
632	Jembatan Pada Jalan Provinsi
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.21	Jalan Sementara
632.22	Jembatan Sementara
632.23	Kantor Proyek
632.24	Gedung Proyek
632.25	Barak Kerja
632.26	Laboratorium Lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31	Galian Tanah
632.32	Timbunan Tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi Kepala Jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi Angker
632.5	Bangunan Bawah
632.51	Kepala Jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon

632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan Orang/Trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang Air
632.7	Bangunan Pengaman
632.71	Turap/ Penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan pelengkap
632.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok Pengamanan
632.83	Patok ROW (Sempadan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Mediun
633	Jembatan pada jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan)
633.2	Bangunan sementara (gedung proyek, kantor proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan bawah
633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6	Bangunan pengamanan (bonjong strek dam, krib)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)

640	BANGUNAN
641	Bangunan pemerintah
641.1	Gedung pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-Kanak
642.2	SD dan Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan rekreasi
643.1	Bangunan Olahraga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	Bank
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung Parkir
645.3	Rumah sakit
645.4	Gedung Telkom
645.5	Terminal angkutan umum
645.6	Terminal angkutan Air
645.7	Terminal angkutan Darat
645.8	Bangunan keagamaan
646	Bangunan Peninggalan sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi

646.3	Kraton
646.4	Rumah tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan tempat tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti/Sederhana
648.12	Sedang/Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah contoh
648.3	Real estate
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan Beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	Atap
649.4	Lantai/Langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu/Jendela
649.51	Pintu Hermonik
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela Kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan / pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (site & servie)

653.1	Kepedatan Rendah (Low density)
653.2	Kepedatan tinggi (high density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (home industri)
655	Daerah Rekreasi (open Spece)
655.1	Publik garden
655.2	Sport & playing fields
655.3	Open space
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan jalan
656.11	Penerangan jalan
656.2	Jaringan kereta api
656.3	Jaringan sungai
657	Assineering
657.1	Saluran pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan penghancur kotoran
657.24	Bangunan pengendapan
657.25	Bangunan pengering lumour
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air buangan Industri
658.4	Kegaduhan

658.5	Kebersihan kota
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir Dan Laut
661.2	Konsrvasi Sumber Daya Alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lapangan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengebangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan kapasitas
667	Pengembangan Lingkungan
670	KETENAGAAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Perijinan
671.12	Rekomendasi
671.13	Pembinaan dan Pengawasan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit tenaga listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
671.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
671.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
671.26	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
671.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.31	Gardu Induk / gardu penghubung / gardu trafo
671.32	Saluran Udara Tenaga Listrik
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (screen)

691.5	Pintu Air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Beku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup penguras (Blow oof)
692.4	Bak pelepas tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphom
693	Instalasi Pengolahan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh bahan kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir manara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir manara bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan Pipa
694.5	Syphom
694.6	Hydran
694.61	Hydran Umum
694.62	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (Air Rolief)

694.72	Katup Pelepas (Blow off)
694.8	Bak pelepas tekanan (Pressuer reducing valve)
700	PENGAWASAN
700.1	Kebijakan dan program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek
701	Pengawasan Inventaris Aset
702	Pengawasan Organisasi dan Tata laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
704	Pengawasan Penelitian / Riset
705	Pengawasan Perhubungan, komunikasi Informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertahanan / BPN
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan pemerintahan provinsi
712	Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
713	Pengawasan pemerintahan Desa
720	BIDANG PEMERINTAHAN
721	Pengawasan Partai termasuk Pendanaan partai, atribut partai dll
722	Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam
723	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan
724	Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam / SAR
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan kesehatan / Makanan / Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan sosial
747	Pengawasan Kependudukan migrasi / Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran

- 749 Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 751 Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
- 752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
- 753 Pengawasan Kehutanan
- 754 Pengawasan Pertambangan / ESDM
- 755 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 756 Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian
- 757 Pengawasan PMDN / PMA
- 758 Pengawasan Perbankan / Moneter
- 759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Pengawasan Pengairan
- 762 Pengawasan Jalan
- 763 Pengawasan Jembatan
- 764 Pengawasan Bangunan
- 765 Pengawasan Tata Ruang Kota
- 766 Pengawasan Tata Lingkungan
- 767 Pengawasan Ketenagaan
- 768 Pengawasan Air Minum
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
- 771 Penyimpanan Pejabat Publik
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 781 Pengawasan Pengadaan PNS
- 782 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
- 783 Keanggotaan PNS Dalam Parpol
- 784 Penyimpanan Pejabat PNS
- 785 Persengketaan PNS
- 790 BIDANG KEUANGAN
- 791 Pengawasan Anggaran
- 792 Pengawasan Akuntansi
- 793 Pengawasan Perbendaharaan
- 794 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah

795	Pengawasan Pendapatan
800	KEPEGAWAIAN
	Termasuk klasifikasi disini : kebijakan kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Statistik
810	PENGADAAN (meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pengangkatan calon pegawai)
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman tes dan pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS Golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS Golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS Golongan III
820	MUTASI
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negri Sipil Golongan III
821.2	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.21	Eselon 1
821.22	Eselon 2
821.23	Eselon 3
821.24	Eselon 4
821.3	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
822	Kenaikan Gaji Berkala

- 822.1 PNS Golongan I
- 822.2 PNS Golongan II
- 822.3 PNS Golongan III
- 822.4 PNS Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat
 - 823.1 PNS Golongan I
 - 823.2 PNS Golongan II
 - 823.3 PNS Golongan III
 - 823.4 PNS Golongan IV
- 824 Pemindahan / Pemilihan / Pembantuan
 - 824.1 PNS Golongan I
 - 824.2 PNS Golongan II
 - 824.3 PNS Golongan III
 - 824.4 PNS Golongan IV
 - 824.5 Lolos Butuh (Mutasi pegawai dari Instansi lain)
- 825 Datasering dan penempatan kembali
- 827 Wajib Militer
- 830 KEDUDUKAN
- 831 Peninjauan masa kerja
- 832 Penyesuaian perangkat / Gaji
 - 832.1 PNS Golongan I
 - 832.2 PNS Golongan II
 - 832.3 PNS Golongan III
 - 832.4 PNS Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijasah (Pencantuman Gelar)
- 834 Penghargaan lainnya
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 - 841 Tunjangan
 - 841.1 Struktur dan Fungsional
 - 841.2 Kehormatan
 - 841.3 Dana Kematian (Uang Duka)
 - 841.4 Tambahan Penghasilan
 - 841.5 Tunjangan Cacat

842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan kesehatan
843.1	Poliklinik, klinik konsultasi
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
845	Perumahan PNS
846	Dispensasi
850	CUTI
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Bersalin
855	Cuti Karena Alasan Penting
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
860	PENILAIAN
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana Karya Satya
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Hadiah berupa Kenaikan Pangkat
861.4	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Ringan
862.2	Sedang
862.3	Berat
863	Konduite / DP3
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
865	Penilaian Kinerja

865.1	Struktural
865.2	Fungsional
866	Rehabilitasi
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan Wewenang
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Korps Kepegawaian
880	PEMBERHANTIAN
881	Atas Permintaan sendiri termasuk pengunduran diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
882.2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
882.3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
882.4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani
885	Tidak dengan Homat
886	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas

887	Tali Asih Pensiun
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
890.1	Perncaanaan Program dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan dalam Jabatan
892.1	Diklatpin
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus, penataran, Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan / OL, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar, Narasumber
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana Pendidikan
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
910	ANGGARAN
911	Keputusan ttg penunjukan pengelolaan keuangan SKPD/PPKD

- 912 Keputusan Gubernur ttg penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
- 913 DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD
- 914 Anggaran Kas
- 915 Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 920 AKUNTANSI
- 921 Laporan-laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- 930 PERBENDAHARAAN
- 931 Surat perintah pencairan dana (SP2D)
- 932 Surat Penolakan Penerbitan SP2D
- 933 Daftar penguji SP2D
- 940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
- 941 Bintek-bintek / Kursus yang berkaitan dengan keuangan
- 950 PENGELOLAAN KAS DAERAH
- 951 Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari Gaji
- 952 Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
- 953 Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN / PPh) dari CV / PT / Instansi
- 954 Surat tanda setoran (STS)
- 955 Laporan Realisasi Daerah
- 955.1 Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
- 955.2 Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
- 956 Rekonsiliasi
- 956.1 Surat rekonsiliasi penerimaan
- 956.2 Laporan Rekonsiliasi Bank
- 957 Laporan Mutasi Penempatan Deposito
- 958 Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
- 960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN
- 961 Tuntutan Ganti Rugi
- 962 Tuntutan Perbendaharaan
- 963 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
- 964 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
- 965 Edaran-edaran

970	PENDAPATAN
971	Perimbangan keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam / Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan di atas Air
973.3	Pajak Bahan bakar kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang kesehatan
974.2	Retribusi Bidang seni budaya dan pariwisata
974.3	Retribusi Bidang perekonomian, perindustrian, dan perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)
974.5	Retribusi Bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll)
974.6	Retribusi Bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
974.7	Retribusi Bidang Perikanan dan kelautan
974.8	Retribusi Bidang pertambangan, pemanfaatn air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi Bidang bidang lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2	Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air


976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya
979	Pendapatan lainnya
979.1	Hasil Penjualan aset Daerah yang di Pisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas
979.13	Penjualan dinas kendaraan roda 2
979.14	Penjualan Dinas Kendaraan Roda 4
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan jasa Giro
979.21	Jasa Giro Kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan / Dealer
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan lain-lain
979.51	Penerimaan kembali kredit BKK
979.52	Ternak tidak layak bibit
979.53	Sewa Internet

979.54 Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving
979.55 Kerjasama Dengan BUMIDA
979.56 Penerimaan DUKS
979.57 Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58 Setoran TP-TGR
979.59 Penerimaan Lainnya dari Setda / SKPD
980 -
990 -

BUPATI PURBALINGGA,
ttd
TASDI

SEKRETARIS DAERAH
ttd
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TAVIP WURJONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19641123 199303 1 006